



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630

Telepon: 021-8090704, Faksimile: 021- 8090928

Laman : <https://jakarta.kemenkumham.go.id>, surel : kanwildki@kemenkumham.go.id

Nomor : W.10-KU.04.01-550
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
Semester II TA 2023 Audited

8 Mei 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V
di -
Jakarta

Bersama ini disampaikan berkas kelengkapan Laporan Keuangan Semester II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta DIPA Setjen (408720) Tahun Anggaran 2023 Audited sebagai berikut :

1. Surat Pengantar;
2. Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas;
3. Catatan atas Laporan Keuangan;
4. Dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jln. M.T. Haryono No. 24 A, Cawang – Jakarta Timur 13630
Telepon 021-8090704 Faksimili 021-8090912, 8090928
Laman : kumham-jakarta.info & jakarta.kemenkumham.go.id
E-mail : kanwildki.kemenkumham@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Kantor Wilayah,




R. Andika Dwi Prasetya

NIP. 196712171991031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	54
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	61
F. Pengungkapan Penting Lainnya	66
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jln. M.T. Haryono No. 24 A, Cawang – Jakarta Timur 13630
Telepon 021-8090704 Faksimili 021-8090912, 8090928
Laman : kumham-jakarta.info & jakarta.kemenkumham.go.id
E-mail : kanwildki.kemenkumham@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 1 Februari 2024
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ibnu Chuldun
NIP. 196603281988111001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp322.332.326 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp28.352.197.770 atau mencapai 99,40 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp28.552.981.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp481.035.979.054 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp591.346.985; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp480.437.857.069; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp6.775.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp102.579.578 dan Rp481.035.979.054.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.540.936, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp29.908.704.005 sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp29.865.163.069. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp296.884.808 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit) -LO sebesar Rp29.568.278.261.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp481.350.992.598 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp29.568.278.261 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp29.150.685.139 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp480.933.399.476.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	322.332.326	#DIV/0!	35.692.878
JUMLAH PENDAPATAN		-	322.332.326	#DIV/0!	35.692.878
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	16.844.193.000	16.729.852.822	99,32	17.035.271.916
Belanja Barang	B.4	10.559.563.000	10.505.199.398	99,49	8.972.584.892
Belanja Modal	B.5	1.119.225.000	1.117.145.550	99,81	417.230.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA		28.522.981.000	28.352.197.770	99,40	26.425.086.808

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	591.346.985	569.555.182
Persediaan yang Belum Diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		591.346.985	569.555.182
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	426.409.350.000	426.409.350.000
Peralatan dan Mesin	C.16	21.877.648.101	19.796.829.808
Gedung dan Bangunan	C.17	63.334.315.450	62.475.554.900
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19	20.520.500	16.529.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(31.203.976.982)	(27.804.585.897)
Jumlah Aset Tetap		480.437.857.069	480.893.677.811
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	183.250.000	183.250.000
Aset Lain-Lain	C.23	90.043.000	2.939.070.429
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(266.518.000)	(3.100.453.039)
Jumlah Aset Lainnya		6.775.000	21.867.390
JUMLAH ASET		481.035.979.054	481.485.100.383
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	88.796.307	78.746.879
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	13.783.271	55.360.906
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.29	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		102.579.578	134.107.785
JUMLAH KEWAJIBAN		102.579.578	134.107.785
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	480.933.399.476	481.350.992.598
JUMLAH EKUITAS		480.933.399.476	481.350.992.598
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		481.035.979.054	481.485.100.383

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	43.540.936	44.359.639
JUMLAH PENDAPATAN		43.540.936	44.359.639
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	16.729.852.822	17.035.271.916
Beban Persediaan	D.3	485.204.918	486.690.803
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.049.003.798	6.039.870.462
Beban Pemeliharaan	D.5	2.257.684.243	1.985.424.807
Beban Perjalanan Dinas	D.6	701.564.064	501.691.416
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.685.394.160	2.629.435.436
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		29.908.704.005	28.678.384.840
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(29.865.163.069)	(28.634.025.201)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		311.889.124	11.789.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(23.484.217)	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.479.901	21.120.876
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		296.884.808	32.910.875
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(29.568.278.261)	(28.601.114.326)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPNP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(29.568.278.261)	(28.601.114.326)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	481.350.992.598	493.041.967.683
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(29.568.278.261)	(28.601.114.326)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	(9.649.784.800)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	(9.649.784.800)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	29.150.685.139	26.559.924.041
EKUITAS AKHIR	E.5	480.933.399.476	481.350.992.598

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman pertama kali dibentuk pada Tahun 1982 yang keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Kantor Wilayah pada saat itu meliputi wilayah Tangerang dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN). Kemudian untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Tangerang diserahkan kepada Kantor Wilayah Jawa Barat dan kemudian dibentuk pula Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: A.325.KP.04.04 Tahun 2001 tanggal 1 Maret 2001

Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah terdiri atas beberapa Divisi. Divisi-divisi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Divisi Administrasi*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan teknis dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan

oleh Sekretaris Jenderal;

2. *Divisi Pemasarakatan*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah;
3. *Divisi Keimigrasian*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah;
4. *Divisi Pelayanan Hukum dan HAM*, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang pamasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : M.HH-03.PR.01.04 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 terdapat perubahan identitas entitas akuntansi. Satuan kerja perwakilan imigrasi dan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengalami perubahan kode Satuan kerja dan kode Eselon I dari semula :

1. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 03 (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) untuk UPT Administrasi Hukum Umum (Balai Harta Peninggalan);
2. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 05 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk UPT Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara);
3. 01 (Sekretariat Jenderal) menjadi 06 (Direktorat Jenderal Imigrasi) untuk UPT Keimigrasian (Perwakilan Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Rumah Deteni Imigrasi).

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah 1 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	0100	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah

sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Tetap

a. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai beban kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan asset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap asset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah asset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2019 s.d 2021. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai Aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Aset Lancar

b. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 Tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

d. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak tujuh belas kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp.24.029.138.000 setelah revisi terakhir menjadi Rp.28.522.981.000. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan anggaran seperti adanya penambahan anggaran tahun 2023 untuk Kantor Wilayah yang Berkinerja Terbaik Tahun 2021, penambahan anggaran belanja sewa kendaraan pejabat Eselon II dan pemeliharaan gedung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari Sekretariat Jenderal serta penambahan anggaran belanja modal untuk Renovasi Rumah Dinas dan anggaran belanja pegawai untuk kekurangan belanja pegawai paad TA 2023. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	15.652.886.000	16.844.193.000
Belanja Barang	8.117.867.000	10.559.563.000
Belanja Modal	258.385.000	1.119.225.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	24.029.138.000	28.522.981.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp322.332.326*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp322.332.326 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berasal dari penjualan peralatan dan mesin yaitu penjualan BMN dibawah 100 juta sebanyak 335 Unit, Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya yaitu pelepasan kendaraan dinas operasional berupa 4 unit Mobil, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dari sewa rumah dinas dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian pembayaran gaji pegawai dan uang makan.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	299.767.899	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	1.963.301	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	-	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	12.121.225	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	8.479.901	
Jumlah	-	322.332.326	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 803,07% dibandingkan realisasi TA. 2022. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya pada Tahun Anggaran 2023.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran
2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	299.767.899	11.789.999	2442,56
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.963.301	1.015.803	93,28
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	5.590.000	-100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.766.200	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	8.479.901	15.530.876	-45,40
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.121.225	-	#DIV/0!
Jumlah	322.332.326	35.692.878	803,07

Realisasi

Belanja Negara

Rp28.352.197.770

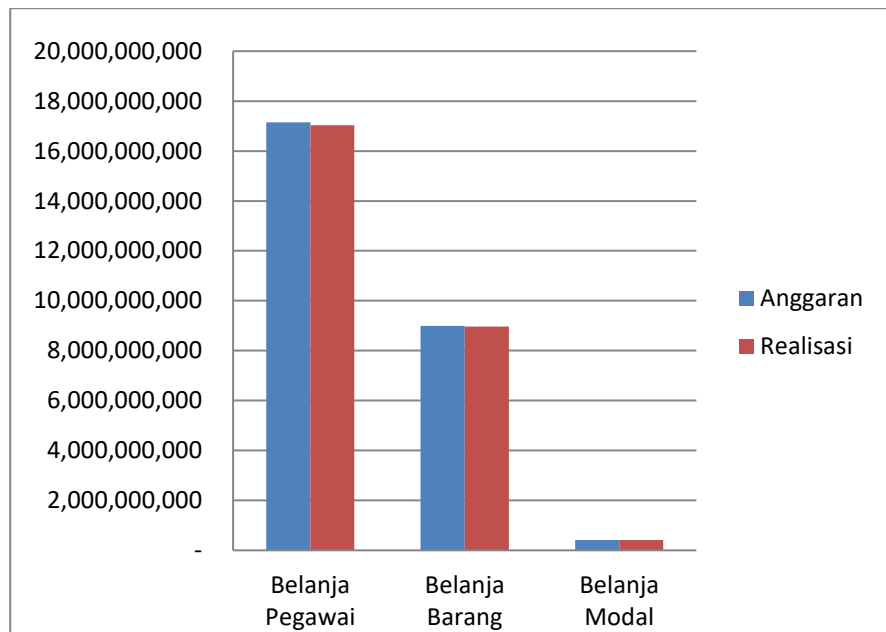
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp28.352.197.770 atau 99.40% dari anggaran belanja sebesar Rp28.522.981.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 tersaji sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran
2023*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	16.844.193.000	16.737.505.121	99,37
Belanja Barang	10.559.563.000	10.505.199.398	99,49
Belanja Modal	1.119.225.000	1.117.145.550	99,81
Belanja Bantuan Sosial	0	0	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	28.522.981.000	28.359.850.069	99,43
Pengembalian Belanja	-	(7.652.299)	
Total Belanja	28.522.981.000	28.352.197.770	99,40

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,29% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya kenaikan pada realisasi belanja barang pada TA 2023
2. Adanya kenaikan pada realisasi belanja modal pada TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	16.729.852.822	17.035.271.916	(1,79)
Belanja Barang	10.505.199.398	8.972.584.892	17,08
Belanja Modal	1.117.145.550	417.230.000	167,75
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	28.352.197.770	26.425.086.808	7,29

*Belanja Pegawai
Rp16.729.852.822*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.729.852.822 dan Rp17.035.271.916. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 1,79 persen dari realisasi belanja TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain bertambahnya pegawai yang mutasi keluar dari Kanwil DKI Jakarta ke satuan kerja lainnya pada Semester II TA. 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16.417.603.121	16.898.537.753	(2,85)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Honorarium	0	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	319.902.000	155.866.000	105,24
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	16.737.505.121	17.054.403.753	(1,86)
Pengembalian Belanja Pegawai	(7.652.299)	(19.131.837)	(60,00)
Jumlah Belanja	16.729.852.822	17.035.271.916	(1,79)

Belanja

Barang

Rp10.505.199.398

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp10.505.199.398 dan Rp8.972.584.892. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 17,08% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pagu belanja barang akibat Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.686.590.951	2.943.750.909	(8,74)
Belanja Barang Non Operasional	1.438.695.137	1.064.093.984	35,20
Belanja Jasa	2.913.668.282	2.034.395.317	43,22
Belanja Pemeliharaan	2.314.104.855	2.012.242.080	15,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	701.564.064	501.691.416	39,84
Belanja Barang Persediaan	450.576.109	416.411.186	8,20
Jumlah Belanja Kotor	10.505.199.398	8.972.584.892	17,08
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	10.505.199.398	8.972.584.892	17,08

*Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2023*

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	9.403.000	9.402.344	99,99
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	71.370.000	71.369.044	100,00
	Jumlah Belanja	80.773.000	80.771.388	100,00

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**
Rp1.117.145.550

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.117.145.550 dan Rp417.230.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 167,75% dari Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini antara lain dikarenakan terdapat anggaran belanja tambahan (ABT) atas renovasi rumah dinas pada anggaran belanja modal tahun anggaran 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran
2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.385.000	417.230.000	(38,07)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	858.760.550	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1.117.145.550	417.230.000	167,75
Pengembalian	0	-	-
Jumlah Belanja	1.117.145.550	417.230.000	167,75

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2023 maupun TA 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran
2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 258.385.000 dan Rp417.230.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun

Anggaran 2023 mengalami penurunan 38,07% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022. Hal ini antara lain dikarenakan menurunnya jumlah pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.385.000	417.230.000	-38,07
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	258.385.000	417.230.000	-38,07
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	258.385.000	417.230.000	-38,07

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp858.760.550 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan 100% terhadap realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun anggaran 2023 dikarenakan tidak tersedianya anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA. 2022

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	858.760.550	0	100,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	858.760.550	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	-	
Jumlah Belanja	858.760.550	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2023 maupun TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 maupun TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A. 2022	Naik (Turun)
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 maupun TA 2022 Belanja

bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Papua	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Biak	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran
2023 dan 2022*

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31

Kas Rp0

Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB Rp0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar TP/TGR Rp0 **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Debitur per Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar TPA Rp0 **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Debitur per Satker	TH 2023	TH 2022
		-	-
	Jumlah	-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar Tahun Anggaran 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp591.346.985

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp591.346.985 dan Rp569.555.182.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Persediaan	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	537.046.417	561.863.736
Bahan untuk Pemeliharaan	54.300.568	7.691.446
Suku Cadang	-	-
Bahan Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	591.346.985	569.555.182

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.11 Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan yang Belum Diregister Rp.0

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Persediaan yang Belum Diregister merupakan akun korolari/akun ikutan yang terbentuk dari Realisasi Belanja Barang Persediaan di aplikasi SAIBA dan Pencatatan Persediaan Masuk dari transaksi pembelian dan transaksi hibah di aplikasi Persediaan. Rincian Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan yang Belum Diregister Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Persediaan yang Belum Diregister	TH 2023	TH 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Tagihan TP/TGR Rp0

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan

adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Debitur per Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
		-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.13 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian TPA untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	Debitur	TH 2023	TH 2022
		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp426.409.350.000

C.15 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per 30 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp426.409.350.000 dan Rp426.409.350.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	426.409.350.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp	-
Hibah	Rp	-
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp	-
Mutasi kurang:		
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	426.409.350.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	426.409.350.000

Tanah yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan data per 31 Desember 2022 seluas 14.577m² dan sudah bersertifikat.

*Peralatan dan
Mesin
Rp21.877.648.101*

C.16 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.877.648.101 dan Rp19.796.829.808. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	19.796.829.808
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	258.385.000
Saldo awal	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	1.289.577.725
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya	Rp	1.656.318.763
Reklasifikasi Masuk	Rp	6.850.000
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
Transfer Keluar	Rp	-
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(1.130.313.195)
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	21.877.648.101
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(19.297.137.305)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	2.580.510.796

Mutasi Tambah:

1. Pembelian 2 buah Lemari Besi senilai Rp7.200.000, 12

buah Tabung Pemadan Api senilai Rp25.200.000, 14 buah Meja Kayu senilai Rp38.500.000, 12 buah A.C Split senilai Rp110.100.000, 1 buah Televisi senilai Rp22.700.000, 3 buah Tablet PC senilai Rp38.400.000 dan 1 buah Scanner senilai Rp11.000.000;

2. Transfer Masuk dari DIPA KI berupa P.C Unit, Video Conference, Laptop, Printer dan Publik Address (Lapangan) senilai Rp1.289.577.725;

3. Penggunaan kembali BMN rusak berat yang telah diperbaiki berupa senilai Rp1.656.318.763;

4. Reklasifikasi masuk berupa bunga plastik 11 buah senilai Rp6.850.000.

Mutasi Kurang:

1. Penghentian Aset dari penggunaan berupa Kamera Digital, P.C Unit, Laptop, Printer, Scanner, dan Aset tetapi lainnya yang rusak berat yang akan diajukan untuk proses usulan pengajuan penghapusan senilai Rp1.130.313.195

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp63.334.315.450*

C.17 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp63.334.315.450 dan Rp62.475.554.900. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	62.475.554.900
Mutasi tambah:	
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Pengembangan melalui KDP	858.760.550
Koreksi Susulan	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Transaksi Normalisasi BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	63.334.315.450
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(11.906.839.677)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	51.427.475.773

Mutasi Tambah:

1. Pengembangan melalui KDP rumah negara golongan I Tipe B 1 Unit dan Tipe C 2 Unit senilai Rp858.760.550.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0*

C.18 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp20.520.500*

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp20.520.500 dan Rp16.529.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	16.529.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Transfer Masuk	3.991.500
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	20.520.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	20.520.500

Mutasi Tambah:

2. Transfer masuk dari DIPA BPHN berupa Monografi (buku) senilai Rp3.993.500

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
		-	0	0	
				0	
	Jumlah	-		-	

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp31.203.976.982*

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp31.203.976.982 dan Rp27.804.585.897. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 21.877.648.101	Rp 19.297.137.305	Rp 2.580.510.796
2	Gedung dan Bangunan	Rp 63.334.315.450	Rp 11.906.839.677	Rp 51.427.475.773
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 20.520.500	Rp -	Rp 20.520.500
	Akumulasi Penyusutan	Rp 85.232.484.051	Rp 31.203.976.982	Rp 54.028.507.069

*Aset Tak
Berwujud
Rp183.250.000*

C.22 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp183.250.000 dan Rp183.250.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	Rp 183.250.000
Jumlah	Rp 183.250.000

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp 183.250.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	Rp -
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 183.250.000
Amortisasi	-Rp 176.475.000
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp 6.775.000

Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan nilai perolehan, amortisasi dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Aset Lain-Lain
Rp90.043.000

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp90.043.000 dan RpRp2.939.070.429. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 2.939.070.429
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp 1.130.313.195
- Transfer masuk (Henti Guna)	Rp 10.048.500
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	-Rp 1.656.318.763
- Penghapusan BMN (BMN yang dihentikan)	-Rp 2.333.070.361
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 90.043.000
Amortisasi	-Rp 90.043.000
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp -

Mutasi tambah:

1. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya berupa kendaraan dinas rusak berat yang akan diajukan untuk proses usulan pengajuan penghapusan senilai

Rp1.130.313.195;

2. Transfer masuk (Henti Guna) berupa P.C Unit 1 buah senilai Rp10.048.500.

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan BMN berupa inventaris kantor rusak berat antara lain lemari kayu, rak kayu, meja, kursi, bangku panjang, meja computer, P.C Unit, printer, dan scanner senilai Rp2.333.070.361;
2. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan menggunakan aktif senilai Rp1.656.318.763.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp266.518.000*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp266.518.000 dan Rp3.101.421.789. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	183.250.000	176.475.000	6.775.000
Software	183.250.000	176.475.000	6.775.000
ATB Lainnya	0	0	0
Aset Lain-lain	90.043.000	90.043.000	0
Jumlah	273.293.000	266.518.000	6.775.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	Tahun 2023
		-
	Jumlah	-

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp88.796.307*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp88.796.307 dan Rp78.746.879. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	PT. PLN (Langganan Listrik)	Rp 88.632.134
2	PT. Telkom Indonesia (Langganan Telkom)	Rp 164.173
Jumlah		88.796.307

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp13.783.271*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp13.783.271 dan Rp55.360.906. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	BANK BRI	13.783.271	Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Ruang Kantor Kas BRI dan ATM BRI sebesar Rp208.116.000 jangka waktu 5 tahun mulai 1 Mei 2019 s.d 30 April 2024
Total		13.783.271	

*Beban yang
Masih harus
Dibayar Rp0*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Utang yang
Belum
Ditagihkan Rp0

C. 29 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Utang yang Belum Ditagihkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Utang Jangka
Pendek
Lainnya Rp0

C. 30 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan utang jangka pendek selain utang kepada pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga dan bagian lancar utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
		-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp480.933.399.476

C.31 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp480.933.399.476 dan Rp481.350.992.598. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp43.540.936

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp43.540.936 dan Rp44.359.639. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	43.540.936	42.593.439	2,22
Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		1.766.200	(100,00)
Jumlah	43.540.936	44.359.639	(1,85)

Pendapatan dari Pengelolaan BMN merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan atas sewa tanah, gedung dan bangunan dari sewa rusun oleh pegawai dan sewa lahan oleh Bank BRI.

Beban

Pegawai

Rp16.729.852.822

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.729.852.822 dan Rp17.035.271.916. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	16.409.950.822	16.879.405.916	(3)
Beban Lembur	319.902.000	155.866.000	105
Jumlah	16.729.852.822	17.035.271.916	(2)

*Beban
Persediaan
Rp485.204.918*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp485.204.918 dan Rp486.690.803. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	485.204.918	486.690.803	(0,31)
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	485.204.918	486.690.803	(0,31)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp7.049.003.798*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.049.003.798 dan Rp6.039.870.462. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.465.305.707	2.723.698.264	-9,49
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.200.000	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	205.758.000	173.640.000	18,50
Beban Barang Operasional Lainnya	6.124.900	20.515.900	-70,15
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9.402.344	24.696.745	-61,93
Beban Bahan	1.210.864.487	903.524.484	34,02
Beban Honor Output Kegiatan	126.178.000	67.400.000	87,21
Beban Barang Non Operasional Lainnya	101.652.650	93.169.500	9,11
Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	996.097.959	903.826.861	10,21
Beban Langganan Telepon	2.011.951	1.669.257	20,53
Beban Langganan Air	33.314.500	982.245	3291,67
Beban Sewa	1.795.993.300	1.107.847.206	62,12
Beban Jasa Profesi	16.400.000	15.200.000	7,89
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	79.900.000	2.500.000	3096,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Jumlah	7.049.003.798	6.039.870.462	16,71

Beban Pemeliharaan Rp2.257.684.234

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester II TA.2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.257.684.234 dan Rp1.985.424.807. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.247.829.737	783.242.190	59,32
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	916.439.803	1.071.768.332	-14,49
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	93.414.703	130.414.285	-28,37
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	2.257.684.243	1.985.424.807	13,71

Beban Perjalanan Dinas Rp501.691.416

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp701.564.064 dan Rp501.691.416. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	215.064.064	138.950.216	54,78
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	401.700.000	182.550.000	120,05
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84.800.000	180.191.200	-52,94
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	701.564.064	501.691.416	39,84

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.685.394.160*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.685.394.160 dan Rp2.629.435.436. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.023.600.154	985.431.276	4
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.640.892.024	1.626.874.380	1
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	2.664.492.178	2.612.305.656	2
Beban Amortisasi Software	13.550.000	13.550.000	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	7.351.982	3.579.780	105
Jumlah Amortisasi	20.901.982	17.129.780	22
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.685.394.160	2.629.435.436	2

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun
2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Surplus(Defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp296.884.808*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp296.884.808 dan Rp32.910.875. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	12.121.225	0	#DIV/0!
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	299.767.899	11.789.999	2442,56
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-23.484.217	0	-
Defisit Selisih Kurs	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara T	0	0	
Penerimaan Kembali Beban Pegawai TAYL	0	0	
Penerimaan Kembali Beban Modal TAYL	0	0	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.479.901	21.120.876	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	-	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	-	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	296.884.808	32.910.875	802,09

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

*Defisit Pos
Luar Biasa
Rp0*

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp481.350.992.598 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp481.350.992.598 dan Rp493.041.967.683.

Surplus/Defisit

E.2 Surplus (Defisit) LO

LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp29.568.278.261 dan Rp28.601.114.326. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Rp28.601.114.326

Dampak

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi/Ke

salahan

Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp0

Penyesuaian

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Rp0

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan

untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp.0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi tersebut berasal dari Reklasifikasi Persediaan/Aset.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp9.649.784.800.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp29.150.685.139

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.150.685.139 dan Rp26.559.924.041. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	28.352.197.770
Diterima dari Entitas Lain	(322.332.326)
Transfer Masuk	1.120.819.695
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	29.150.685.139

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp322.332.326 sedangkan DKEL sebesar Rp28.352.197.770.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.120.819.695

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Tahun 2023 disajikan pada lampiran.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp480.933.399.476 dan Rp481.350.992.598.

Ekuitas Akhir

Rp481.350.992.598

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca Per 31 Desember 2023.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Sesuai instruksi surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.3-KU.04.01-136 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penggunaan Akun Khusus COVID-19 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus Covid, seluruh satuan kerja tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai semester II tahun 2023 dan segera melakukan revisi/koreksi dokumen sumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada mapping dari akun belanja khusus COVID-19 ke akun regular sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tanggal 21 September 2023 telah melakukan ralat SPM untuk melakukan koreksi atas realisasi semester II pada akun Belanja khusus COVID-19 yaitu SPM nomor 00157A tanggal 3 Juli 2023 sebesar Rp11.600.000, 00172A tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp1.868.676, 00183A tanggal 8 Agustus 2023 sebesar Rp129.900 dan 00184A tanggal 8 Agustus 2023 sebesar Rp1.879.482.
2. Sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.3.KU.01.02-10 tanggal 18 Januari 2023 tentang Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi DIPA Belanja Barang TA 2023 dan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1.PR.01.04-31 tanggal 13 Januari 2023 tentang Fasilitasi Usulan Tambahan Anggaran 2023 untuk 9 Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik tahun 2021,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menerima Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp150.000.000. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melakukan *Automatic Adjustment* sebesar Rp.150.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp.24.029.138.000 menjadi Rp24.209.138.000.

3. Sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.3.KU.01.02-62 tanggal 30 Maret 2023 tentang Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi DIPA Belanja Sewa Kendaraan TA 2023 dan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1.PR.01.04-242 tanggal 24 Maret 2023 tentang Fasilitasi Usulan Tambahan Anggaran 2023 untuk Belanja Sewa Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional pada Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menerima Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp124.000.000 untuk sewa 1 Unit kendaraan operasional Eselon II . Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melakukan *Automatic Adjustment* sebesar Rp.124.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp.24.209.138.000 menjadi Rp24.333.138.000.
4. Sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.3.KU.01.02-152 tanggal 12 Mei 2023 tentang Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi DIPA Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2023 pada Kantor Wilayah dan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1.PR.01.04-375 tanggal 9 Mei 2023 tentang Fasilitasi Usulan Tambahan Anggaran 2023 Kantor Wilayah, Setjen Pusat, dan Direktorat Jenderal HAM TA 2023. Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menerima Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp860.840.000 untuk Renovasi 3 Rumah Dinas Negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melakukan *Automatic Adjustment* sebesar Rp.860.840.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp.24.333.138.000 menjadi Rp25.193.978.000.

5. Anggaran dan realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 TA. 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta DIPA Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

No	Akun	Anggaran	Realisasi	%
1	521131 - Belanja Opr. Penangana Covid-19	9.403.000	9.402.344	99,99%
3	521841 - Belanja Persediaan Penanganan Covid-19	71.370.000	71.369.044	#####
Jumlah		80.773.000	80.771.388	#####

6. Selama periode tahun anggaran 2023, capaian output strategis yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	EBA.956	Layanan BMN	146.865.000	Rp146.761.550
2	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	317.648.000	Rp317.286.700
3	EBA.959	Layanan Protokoler	14.400.000	Rp14.400.000
4	EBA.962	Layanan Umum	900.000	Rp900.000
5	EBA.994	Layanan Perkantoran	24.267.616.000	Rp24.119.093.382
6	EBB.951	Layanan Sarana Internal	258.385.000	Rp258.385.000
7	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	860.840.000	Rp858.760.550
8	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	2.203.190.000	Rp2.197.001.284
9	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	160.770.000	Rp160.245.553
10	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	23.400.000	Rp22.817.600
11	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	96.867.000	Rp96.107.350
12	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	172.100.000	Rp168.091.100

7. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor: W10.KU.03.03-987 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah

Membayar (SPM)/Penguji SPP, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Keterangan
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta	Kuasa Pengguna Anggaran	Ibnu Chuldun
	Pejabat Pembuat Komitmen	Ade Kusuma
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Mutia Farida
	Bendahara	Dian Erviana

8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memiliki satu rekening virtual Bendahara Pengeluaran pada Bank BRI Kantor Kas Kanwil Depkumham dengan nama rekening BPG 139 Kanwil Kemenkumham Jakarta Raya nomor 650884087201000.
9. Pada Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melakukan penjurnalan pada aplikasi SAIBA sebagai berikut :
 - a. Jurnal Penyesuaian pada tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp.78.594.030 merupakan Jurnal Balik Tagihan Listrik Bulan Januari 2023 atas Beban Desember 2022;
 - b. Jurnal Penyesuaian pada tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp.152.849 merupakan Jurnal Balik Tagihan Telepon Bulan Januari 2023 atas Beban Desember 2022;
 - c. Jurnal Penyesuaian pada tanggal 17 Januari 2023 senilai Rp.55.360.906 merupakan Jurnal Balik

Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Ruang Kantor Kas BRI dan ATM BRI sebesar Rp.208.116.000 jangka waktu 5 tahun mulai 1 Mei 2019 s.d 30 April 2024.

- d. Jurnal Penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp.88.632.134 merupakan Jurnal Tagihan Listrik Bulan Januari 2024 atas Beban Desember 2023;
- e. Jurnal Penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp.164.173 merupakan Jurnal Tagihan Telepon Bulan Januari 2024 atas beban Desember 2023;
- f. Jurnal Penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp.13.783.271 merupakan Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Ruang Kantor Kas BRI dan ATM BRI sebesar Rp.208.116.000 jangka waktu 5 tahun mulai 1 Mei 2019 s.d 30 April 2024.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA 408720

Tgl Data : 29/01/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 6:36 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	28,522,981,000	28,352,197,770	(170,783,230)	99	26,555,762,000	26,425,086,808	(130,675,192)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 29 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

IBNU CHULDUN
196603281988111001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 408720
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/01/24 6:38 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 29/1/24 2:14 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,843,591,000	11,471,495,000	11,451,902,240	0	11,451,902,240	99.83	19,592,760
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	240,000	190,000	173,442	1,895	171,547	91.29	18,453
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	798,000,000	744,656,000	740,440,088	2,246,530	738,193,558	99.43	6,462,442
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	222,650,000	210,701,000	209,647,336	136,674	209,510,662	99.5	1,190,338
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	434,000,000	418,595,000	415,590,000	0	415,590,000	99.28	3,005,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	820,000,000	949,259,000	944,550,000	1,260,000	943,290,000	99.5	5,969,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	31,600,000	50,550,000	48,196,315	0	48,196,315	95.34	2,353,685
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	554,922,000	605,581,000	603,620,700	724,200	602,896,500	99.68	2,684,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,404,248,000	1,742,664,000	1,684,808,000	703,000	1,684,105,000	96.68	58,559,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	375,033,000	330,550,000	318,675,000	2,580,000	316,095,000	96.41	14,455,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	15,484,284,000	16,524,241,000	16,417,603,121	7,652,299	16,409,950,822	99.35	114,290,178
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	168,602,000	319,952,000	319,902,000	0	319,902,000	99.98	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	168,602,000	319,952,000	319,902,000	0	319,902,000	99.98	50,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	15,652,886,000	16,844,193,000	16,737,505,121	7,652,299	16,729,852,822	99.37	114,340,178
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,271,746,000	2,485,089,000	2,465,305,707	0	2,465,305,707	99.2	19,783,293
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	12,000	0	0	0	0	12,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	222,600,000	205,776,000	205,758,000	0	205,758,000	99.99	18,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,600,000	6,148,000	6,124,900	0	6,124,900	99.62	23,100
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36,000,000	9,403,000	9,402,344	0	9,402,344	99.99	656
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,549,946,000	2,706,428,000	2,686,590,951	0	2,686,590,951	99.27	19,837,049
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	823,688,000	1,220,716,000	1,210,864,487	0	1,210,864,487	99.19	9,851,513
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	88,470,000	126,178,000	126,178,000	0	126,178,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	114,900,000	101,720,000	101,652,650	0	101,652,650	99.93	67,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,027,058,000	1,448,614,000	1,438,695,137	0	1,438,695,137	99.32	9,918,863
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	258,535,000	379,269,000	379,207,065	0	379,207,065	99.98	61,935
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	142,238,000	71,370,000	71,369,044	0	71,369,044	100	956
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	400,773,000	450,639,000	450,576,109	0	450,576,109	99.99	62,891

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 408720
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/01/24 6:38 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 29/1/24 2:14 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	864,000,000	986,064,000	986,059,855	0	986,059,855	100	4,145
522112	Belanja Langganan Telepon	2,400,000	2,004,000	2,000,627	0	2,000,627	99.83	3,373
522113	Belanja Langganan Air	1,200,000	33,324,000	33,314,500	0	33,314,500	99.97	9,500
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	1,200,000	0	0	0	0		0
522141	Belanja Sewa	262,600,000	1,796,101,000	1,795,993,300	0	1,795,993,300	99.99	107,700
522151	Belanja Jasa Profesi	42,600,000	17,000,000	16,400,000	0	16,400,000	96.47	600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	28,400,000	80,300,000	79,900,000	0	79,900,000	99.5	400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,202,400,000	2,914,793,000	2,913,668,282	0	2,913,668,282	99.96	1,124,718
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,799,437,000	1,248,403,000	1,247,829,737	0	1,247,829,737	99.95	573,263
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	140,113,000	149,900,000	149,835,315	0	149,835,315	99.96	64,685
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	691,500,000	933,488,000	916,439,803	0	916,439,803	98.17	17,048,197
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,631,050,000	2,331,791,000	2,314,104,855	0	2,314,104,855	99.24	17,686,145
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	79,840,000	219,268,000	215,064,064	0	215,064,064	98.08	4,203,936
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	226,800,000	402,750,000	401,700,000	0	401,700,000	99.74	1,050,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	85,280,000	84,800,000	0	84,800,000	99.44	480,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	306,640,000	707,298,000	701,564,064	0	701,564,064	99.19	5,733,936
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,117,867,000	10,559,563,000	10,505,199,398	0	10,505,199,398	99.49	54,363,602
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258,385,000	258,385,000	258,385,000	0	258,385,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	258,385,000	258,385,000	258,385,000	0	258,385,000	100	0
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	860,840,000	858,760,550	0	858,760,550	99.76	2,079,450
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	860,840,000	858,760,550	0	858,760,550	99.76	2,079,450
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	258,385,000	1,119,225,000	1,117,145,550	0	1,117,145,550	99.81	2,079,450
	JUMLAH BELANJA	24,029,138,000	28,522,981,000	28,359,850,069	7,652,299	28,352,197,770	99.43	170,783,230

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 408720

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 29/01/24 6:38 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12,121,225	0	12,121,225	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	299,767,899	0	299,767,899	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,963,301	0	1,963,301	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	313,852,425	0	313,852,425	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,479,901	0	8,479,901	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	8,479,901	0	8,479,901	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	322,332,326	0	322,332,326	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	322,332,326	0	322,332,326	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 29/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 6:35 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	43,540,936	44,359,639	(818,703)	(1.846)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	43,540,936	44,359,639	(818,703)	(1.846)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	43,540,936	44,359,639	(818,703)	(1.846)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	16,729,852,822	17,035,271,916	(305,419,094)	(1.793)
Beban Persediaan	485,204,918	486,690,803	(1,485,885)	(0.305)
Beban Barang dan Jasa	7,049,003,798	6,039,870,462	1,009,133,336	16.708
Beban Pemeliharaan	2,257,684,243	1,985,424,807	272,259,436	13.713
Beban Perjalanan Dinas	701,564,064	501,691,416	199,872,648	39.84
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 29/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 6:35 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,685,394,160	2,629,435,436	55,958,724	2.128
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	29,908,704,005	28,678,384,840	1,230,319,165	4.29
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(29,865,163,069)	(28,634,025,201)	(1,231,137,868)	4.3
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	288,404,907	11,789,999	276,614,908	2,346.183
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	311,889,124	11,789,999	300,099,125	2,545.37
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	23,484,217	0	23,484,217	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,479,901	21,120,876	(12,640,975)	(59.851)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,479,901	21,120,876	(12,640,975)	(59.851)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	296,884,808	32,910,875	263,973,933	802.087
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(29,568,278,261)	(28,601,114,326)	(967,163,935)	3.382
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(29,568,278,261)	(28,601,114,326)	(967,163,935)	3.382

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 29 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

IBNU CHULDUN
196603281988111001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 6:36 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	481,350,992,598	493,041,967,683	(11,690,975,085)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(29,568,278,261)	(28,601,114,326)	(967,163,935)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(9,649,784,800)	9,649,784,800	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(9,649,784,800)	9,649,784,800	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	29,150,685,139	26,559,924,041	2,590,761,098	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(417,593,122)	(11,690,975,085)	11,273,381,963	-
EKUITAS AKHIR	480,933,399,476	481,350,992,598	(417,593,122)	-

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 29 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

IBNU CHULDUN

196603281988111001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 408720

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl. Cetak 29/01/2024 6:40 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	561,863,736	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,691,446	0
0.0	131111	Tanah	426,409,350,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	19,796,829,808	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	62,475,554,900	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	16,529,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	17,538,638,244
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	10,265,947,653
0.0	162151	Software	183,250,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2,939,070,429	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,937,528,039
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	162,925,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	78,746,879
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	55,360,906
0.0	391111	Ekuitas	0	481,350,992,598
JUMLAH			512,390,139,319	512,390,139,319

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 6:37 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	591,346,985	569,555,182	21,791,803	3.83
JUMLAH ASET LANCAR	591,346,985	569,555,182	21,791,803	3.83
ASET TETAP				
Tanah	426,409,350,000	426,409,350,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	21,877,648,101	19,796,829,808	2,080,818,293	10.51
Gedung dan Bangunan	63,334,315,450	62,475,554,900	858,760,550	1.37
Aset Tetap Lainnya	20,520,500	16,529,000	3,991,500	24.15
AKUMULASI PENYUSUTAN	(31,203,976,982)	(27,804,585,897)	(3,399,391,085)	12.23
JUMLAH ASET TETAP	480,437,857,069	480,893,677,811	(455,820,742)	(0.09)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	183,250,000	183,250,000	0	0.00
Aset Lain-lain	90,043,000	2,939,070,429	(2,849,027,429)	(96.94)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(266,518,000)	(3,100,453,039)	2,833,935,039	(91.40)
JUMLAH ASET LAINNYA	6,775,000	21,867,390	(15,092,390)	(69.02)
JUMLAH ASET	481,035,979,054	481,485,100,383	(449,121,329)	(0.09)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	88,796,307	78,746,879	10,049,428	12.76
Pendapatan Diterima Dimuka	13,783,271	55,360,906	(41,577,635)	(75.10)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	102,579,578	134,107,785	(31,528,207)	(23.51)
JUMLAH KEWAJIBAN	102,579,578	134,107,785	(31,528,207)	(23.51)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	480,933,399,476	481,350,992,598	(417,593,122)	(0.09)
JUMLAH EKUITAS	480,933,399,476	481,350,992,598	(417,593,122)	(0.09)
JUMLAH EKUITAS	480,933,399,476	481,350,992,598	(417,593,122)	(0.09)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	481,035,979,054	481,485,100,383	(449,121,329)	(0.09)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 29 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

IBNU CHULDUN
196603281988111001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 29/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 6:37 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	537,046,417	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	54,300,568	0
0.0	131111	Tanah	426,409,350,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	21,877,648,101	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	63,334,315,450	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,520,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	19,297,137,305
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	11,906,839,677
0.0	162151	Software	183,250,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	90,043,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	90,043,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	176,475,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	88,796,307
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	13,783,271
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	28,352,197,770
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	322,332,326	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,120,819,695
0.0	391111	Ekuitas	0	481,350,992,598
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12,121,225
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	299,767,899
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	43,540,936
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,479,901
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	11,451,902,240	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	171,547	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	738,193,558	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	209,510,662	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	415,590,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	943,290,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	48,196,315	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	602,896,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,684,105,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	316,095,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	319,902,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,465,305,707	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	205,758,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	6,124,900	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9,402,344	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 29/01/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 6:37 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	1,210,864,487	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	126,178,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	101,652,650	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	996,097,959	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,011,951	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	33,314,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,795,993,300	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	16,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	79,900,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,247,829,737	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	916,439,803	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	215,064,064	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	401,700,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84,800,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,023,600,154	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,640,892,024	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	13,550,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	7,351,982	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	485,204,918	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	93,414,703	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	23,484,217	0
JUMLAH			542,760,994,584	542,760,994,584

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 29 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

IBNU CHULDUN
196603281988111001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 6:37 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	28,352,197,770
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	322,332,326	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	12,121,225
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	299,767,899
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,963,301
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,479,901
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,451,902,240	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	173,442	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	740,440,088	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	209,647,336	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	415,590,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	944,550,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	48,196,315	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,620,700	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,684,808,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	318,675,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	319,902,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,465,305,707	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	205,758,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,124,900	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	9,402,344	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,210,864,487	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	126,178,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	101,652,650	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	379,207,065	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	71,369,044	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	986,059,855	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,000,627	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	33,314,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,795,993,300	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	16,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	79,900,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,247,829,737	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149,835,315	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	916,439,803	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	215,064,064	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	401,700,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	84,800,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (408720) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 6:37 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258,385,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	858,760,550	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,895
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,246,530
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	136,674
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,260,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	724,200
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	703,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,580,000
JUMLAH			28,682,182,395	28,682,182,395

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 29 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

IBNU CHULDUN

196603281988111001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: SEK.3-KU.04.02-73

Pada hari ini Kamis tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2023 antara Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Raya (Sekretariat Jenderal) sebagai UAKPA dengan Biro Keuangan - Sekretariat Jenderal sebagai UAPPA-E1.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 menggunakan Basis Akrual. Laporan Keuangan terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual, akun-akun dalam suatu Laporan Keuangan saling terhubung dengan akun pada Laporan Keuangan lainnya. Keterhubungan antar akun tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan salah saji pada Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis atas hubungan antar Laporan dan perhitungan akrual atas akun-akun pada Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca didapatkan uraian sebagai berikut :

ANALISA DATA ANTAR AKUN LAPORAN KEUANGAN

1 Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		31 Desember 2023 (Unaudited)
	Uraian	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
	Uang Muka dari KPPN	-
	Selisih	-
	Penjelasan :	

2 Aset = Kewajiban + Ekuitas		31 Desember 2023 (Unaudited)
	Uraian	
	Aset Tahun Berjalan	481.035.979.054,00
	Kewajiban Tahun Berjalan	102.579.578,00
	Ekuitas Tahun Berjalan	480.933.399.476,00
	Selisih	-
	Penjelasan :	

3 Saldo Akun Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE) = Total Belanja Netto pada LRA		31 Desember 2023 (Unaudited)
	Uraian	
	Ditagihkan ke Entitas Lain	28.352.197.770,00
	Total Belanja Netto pada LRA	28.352.197.770,00
	Selisih	-
	Penjelasan :	

4 Saldo akun Diterima dari Entitas Lain (LPE) = total Pendapatan Netto pada LRA		31 Desember 2023 (Unaudited)
	Uraian	
	Diterima dari Entitas Lain	322.332.326,00
	total Pendapatan Netto pada LRA	322.332.326,00
	Selisih	-
	Penjelasan :	

5 Angka surplus/defisit pada LO = angka surplus/defisit pada LPE		
Uraian	31 Desember 2023 (Unaudited)	
surplus/defisit pada LO	-	29.568.278.261,00
surplus/defisit pada LPE	-	29.568.278.261,00
Selisih		-
Penjelasan :		

6 Angka ekuitas awal pada LPE tahun berjalan = angka ekuitas akhir pada LPE dan Neraca TA sebelumnya		
Uraian	31 Desember 2023 (Unaudited)	
ekuitas awal pada LPE tahun berjalan		481.350.992.598,00
ekuitas akhir pada LPE dan Neraca TA sebelumnya		481.350.992.598,00
Selisih		-
Penjelasan :		

7 Angka ekuitas akhir pada LPE = angka ekuitas pada Neraca tahun berjalan		
Uraian	31 Desember 2023 (Unaudited)	
ekuitas akhir pada LPE		480.933.399.476,00
ekuitas pada Neraca tahun berjalan		480.933.399.476,00
Selisih		-
Penjelasan :		

Jakarta, 1 Februari 2024
Operator Sakti GLP


Ardilla Hasni
NIP. 19931220 201712 2 001

Operator GLP Aset & Persediaan


Laeli Zuhriyah
NIP. 19930712 201901 2 001



Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Raya


Evi Purwaningsih
NIP. 19720626 199203 2 001

Mengetahui,

Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan - Sekretariat Jenderal


Anna Ernita
NIP. 19770402 200112 2 001

Kolom Verifikasi	Nama	Paraf
2. Pembina Unit Utama (DIPA SETJEN)	Nia Efriyanti	
1. Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Eni Fitriah	



**RINGKASAN HASIL ANALISIS DATA LAPORAN KEUANGAN (ANDALAKU)
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
PER 31 DESEMBER 2023 (UNAUDITED)**

Kode Satker/Wilayah/Unit E1 408720
Uraian Satker/Kanwil/Unit E1 Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Raya (Sekretariat Jenderal)

A ANALISIS DATA ANTAR AKUN LAPORAN KEUANGAN

	Selisih	Penjelasan
1 Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	-	
2 Aset = Kewajiban + Ekuitas	-	
3 Saldo Akun Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE) = Total Belanja Netto pada LRA	-	
4 Saldo akun Diterima dari Entitas Lain (LPE) = total Pendapatan Netto pada LRA	-	
5 Angka surplus/defisit pada LO = angka surplus/defisit pada LPE	-	
6 Angka ekuitas awal pada LPE tahun berjalan = angka ekuitas akhir pada LPE dan Neraca TA sebelumnya	-	
7 Angka ekuitas akhir pada LPE = angka ekuitas pada Neraca tahun berjalan	-	

B ANALISIS REALISASI BELANJA DENGAN MUTASI ASET

1 Tanah		
a	Realisasi Belanja Tanah	-
b	Mutasi + Tanah dari Realisasi belanja	-
c	Selisih	-
d	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Realisasi Belanja Tanah SP2D BG 2022	-
e	Total faktor yang mempengaruhi	-
f	<i>Control</i>	-
2 Peralatan dan Mesin		
a	Realisasi Belanja Peralatan dan mesin	258.385.000,00
b	Mutasi + PM dari Realisasi belanja	258.385.000,00
c	Selisih	-
d	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Belanja Modal Lainnya membentuk Peralatan dan Mesin	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk Software	-
e	Total faktor yang mempengaruhi	-
f	<i>Control</i>	-
3 Gedung dan Bangunan		
a	Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan	858.760.550,00
b	Mutasi + GB dari Realisasi belanja	858.760.550,00
c	Selisih	-
d	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan SP2D BG 2022	-
	Belanja Modal Lainnya membentuk Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk Aset Tetap Lainnya	-
e	Total faktor yang mempengaruhi	-
f	<i>Control</i>	-

4 Jalan, Irigrasi dan Jaringan	
a	Realisasi Belanja JIJ -
b	Mutasi + JIJ dari Realisasi belanja -
c	Selisih -
d Faktor Yang Mempengaruhi	
	Belanja Modal Jalan, Irigrasi dan Jaringan membentuk Persediaan -
	Pengembalian belanja Modal Jalan, Irigrasi dan Jaringan -
	Belanja modal ekstra membentuk Jalan, Irigrasi dan Jaringan Intra -
	Realisasi Belanja Jalan, Irigrasi dan Jaringan SP2D BG 2022 -
e	Total faktor yang mempengaruhi -
f	<i>Control</i> -

5 Aset Lainnya	
a	Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dan Aset Lair -
b	Mutasi + Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya dar -
c	Selisih -
d Faktor Yang Mempengaruhi	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk Aset Tetap Lainnya -
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin membentuk Software -
	BAST RPATA penampungan atas Pekerjaan yang akan diselesaikan pada Tahun 2024 -
	Penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak diselesaikan -
	Realisasi Belanja Modal Lainnya SP2D BG 2022 -
e	Total faktor yang mempengaruhi -
f	<i>Control</i> -

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Evi Purwaningsih
NIP. 19720626 199203 2 001

Penyusun Laporan Keuangan



Ardilla Hasni
NIP. 19931220 201712 2 001

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2023**

Kode dan Nama UAKPA : (408720) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
 Kode dan Nama UAPPAW : (0100) DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Sekretariat Jenderal
 Kode dan Nama K/L : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak

	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak

	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	√		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	√		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	√		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	√		Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada	√		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK		√	Ya/Tidak
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat		√	Ya/Tidak

6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai				
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	√		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	√		Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitungn SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya

4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan	√		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	√		Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Evi Purwaningsih
NIP 197206261992032001

Jakarta, 15 Januari 2024
Penelaah,

Ardilla Hasni
NIP 199312202017122001